

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2007, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Atmosudoirdjo, Prayudi, 1983, *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Berge, Ten, 1992, *Pengantar Hukum Perizinan*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Campbell Black, Henry Campbell, 1968, *BLACK'S LAW DICTIONARY Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Publishing Company, United State.

Hanitijo Soemitro, Ronny 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan VIII*, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Prins, W.F, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradanya Paramita, Jakarta.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Perizinan - Problem, dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Penataan Ruang*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan III*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surkhamad, Winamo, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Warlan Yusuf, Asep 1997, *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahiayang.

Yamin, Moh 2007, *Pelatihan Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum: Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik Serta Aplikasinya*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta.

B. Jurnal Dan Makalah

Fence M Wantu, 2011, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Hayati, Tri 2006, *Diregulasi dan Debirokratisasi Sistem Perijinan di Indonesia* (Tinjauan dari Hukum Administrasi Negara), PT Junta Tunas Mulia, Jakarta.

Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia)*. LP3ES. Jakarta.

Kementrian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang
Laut Direktorat Perencanaan Ruang Laut, 2018, *Rencana Zonasi
Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila*

Laporan Penelitian “*Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Minerba di Kawasan Hutan Lindung*”, Pusat Perencanaan
Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. 2013.

C. Internet

<http://eprints.undip.ac.id/16668/>. Diakses pada hari Senin 25 November 2019
Pukul 09:06 WIB.

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=90321&obyek_id=4.
Diakses pada hari Senin 25 November 2019 Pukul 09:08 WIB.

<http://eprints.ums.ac.id/7269/1/R100040017.pdf>. Diakses pada hari Senin 25
November 2019 pukul 09:11 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> pada hari jumat, 18 Oktober 2019
pukul 13.00 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>, Diakses pada Senin, 29 Juli 2019 Pukul
22:50 WIB

<https://kkp.go.id/djprl/artikel/2798-refleksi-2017-dan-outlook-2018-membangun-dan-menjagaekosistem-laut-indonesia-bersama-ditjen-pengelolaan-ruang-laut>. Diakses pada Jumat, 18 Oktober 2019, Pukul
09.00 wib

<https://kkp.go.id/djprl/bpspldenpasar/artikel/3539-jawa-timur-siap-mengelola-sumberdaya-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil>
<https://kkp.go.id/djprl/bpspldenpasar/artikel/3539-jawa-timur-siap-mengelola-sumberdaya-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil>, Diakses
pada 18 oktober 2019 Pulul 09.45 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2019/04/23/13381801/kkp-tegaskan-pemanfaatan-potensi-pulau-pulau-kecil-belum-maksimal>. Diakses
Jumat, 18 oktober 2019, Pukul 11.00 WIB

<https://www.lintech.co.id/> diakses pada 10 Febuari 2020

<https://thelawdictionary.org/permit/> Diakses Senin, 29 Juli 2019 pukul 23:00
WIB

<https://www.bappenas.go.id> > Penataan Ruang dan Pertanahan diakses pada
hari jumat, 18 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB

D. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 981 tentang Hukum Acara Pidana.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan Teknik
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undangundang, Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

E. Sumber Lainnya

Agus dan Syarif, PT Lintech Duta Pratama dalam rapat musyawarah dengan
PT Prakitri Hasta Darma terkait tumpang tindih wilayah yang
diselenggarakan oleh Bappeda dan disampaikan kepada penulis oleh
Solihin, Pimpinan Proyek PT Prakitri Hasta Darma, wawancara yang
dilakukan pada tanggal 15 Maret 2020.

Dani, Konsultan AMDAL PT Adi Banua, Bagan Kronologi Pengurusan
AMDAL PT Prakitri Hasta Darma, 2019.

Doni Rizal, Direktur Operasional PT Prakitri Hasta Darma, wawancara yang dilakukan pada 25 Maret 2020.

Dinas Kelautan dan Perikanan, Peta Lokasi PT Lintech Duta Pratama, 26 Maret 2019.

_____, Direktur Operasional PT Prakitri Hasta Darma, Peta Lokasi PT Prakitri Hasta Darma yang direncanakan akan direklamasi, 2018.

_____, Direktur Operasional PT Prakitri Hasta Darma, Peta Lokasi PT Prakitri Hasta Darma dan PT Lintech Duta Pratama yang Bersebelahan.

_____, Direktur Operasional PT Prakitri Hasta Darma, Peta Lokasi PT Prakitri Hasta Darma yang ditumbuhi bakau.

Ratna, Kantor Notaris Ratna, Lamongan, wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2020.

Solihin, Pimpinan Proyek PT Prakitri Hasta Darma, wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2020.

Taufik Liem, Direktur Keuangan PT Prakitri Hasta Darma, informasi didapatkan pada bulan Februari 2018.

P2T Provinsi Jawa Timur, Berita Acara Rapat Koordinasi, 26 Maret 2019.

_____, Daftar Kehadiran Rapat Pembahasan Permohonan IPR untuk Kegiatan Pembangunan Dok/Galangan Kapal PT Prakitri Hasta Darma, 29 Maret 2019.



**ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI HUKUM DARI DIBERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN
2018-2038 TERHADAP PELAKU USAHA EKSISTING DI KABUPATEN LAMONGAN DARI SEGI
KEPASTIAN HUKUM**
ARTHA DEWINUR HAJJAH, I Gusti Agung Made Wardana.,SH.,L.L.M.,Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>